

BAB II

YAKUZA DAN KEJAHATAN

2.1 Yakuza Tradisional (*Teikiya dan Bakuto*)

Berdasarkan sejarahnya, yakuza menurut persepsi publik di Jepang adalah Robin Hoods (pahlawan) yang melindungi warga sipil dari ancaman maupun kekerasan *ronin* atau kaum samurai tak bertuan (Gragert 1997, 148-154). Pada abad ke-16, pergantian kepemimpinan pasca wafatnya Toyotomi Hideyoshi, mengakibatkan pecahnya perang antara kubu Tokugawa Ieyasu, melawan kubu Ishida Mitsunari dalam perebutan supremasi kekuasaan Hideyoshi, yang dikenal sebagai *Sekigahara no tatakai* atau pertempuran Sekigahara. Pertempuran dimenangkan oleh pihak Tokugawa, Jepang dalam masa damai (abad ke-17), mengakibatkan sekitar 500.000 samurai menjadi *ronin*. Para *ronin* tidak memiliki keahlian lain selain bertarung, membentuk kelompok yang disebut *hatamoto-yakko* (pelayan *shogun*) yang meneror dan merampok masyarakat dipenjuru wilayah Jepang. Terdengar seperti nenek moyang yakuza, namun *hatamoto-yakko* bukanlah cikal bakal yakuza melainkan lawannya yaitu, *machi-yakko* (pengabdikan kota).

Machi-yakko terbentuk dari gerombolan warga-warga muda kota termasuk *ronin* di Jepang, bertugas untuk melawan *hatamoto-yakko*. Meski sebagian besar anggotanya kurang ahli dalam bertarung, *machi-yakko* mampu mengalahkan dan menggeser *hatamoto-yakko* dari kehidupan sosial di Jepang. Dengan tergesernya *hatamoto-yakko*, *machi-yakko* beralih profesi dari semula pahlawan menjadi preman Jepang. Sebagai preman, *machi-yakko* terbagi menjadi dua kelompok yakni: *bakuto* (penjudi tradisional) dan *teikiya* (penjaja keliling). Meski susunan

(pangkat) keduanya sama ⁶, namun masing-masing kelompok memiliki keanggotaan, asal, dan wilayah dengan bosnya tersendiri.

Tekiya beroperasi di pasar-pasar dan bazar di Jepang, memperoleh keuntungan dari berbagai kegiatan komersial seperti alokasi kios atau warung pinggir jalan dan barang. Mereka (bos *tekiya*) meminta bayaran (uang) dari para pedagang yang hendak membuka warungnya dan untuk perlindungan. Apabila pedagang tersebut menolak untuk membayar, mereka (*tekiya*) mengancam akan melakukan kekerasan seperti mencuri, merusak properti dan melakukan penyerangan dan lainnya. Meski tergolong ilegal, operasi *tekiya* diperbolehkan (legal). Lebih dari itu, penguasa feodal Jepang memberikan para bos *tekiya* legitimasi sebagai “pengawas” untuk mengurangi penipuan yang meluas dan mencegah perselisihan antar geng. Seiring pesatnya perkembangan kota, *tekiya* mulai menyebar dan membentuk pasar mereka sendiri. Namun terlepas dari legitimasinya, *tekiya* tetap melanjutkan kegiatan ilegal mereka seperti pemerasan, perlindungan usaha dan berbuat keonaran (konflik antar geng). Sebaliknya, meski tidak mendapat legitimasi sebagaimana *tekiya*, *bakuto* bekerja di bawah Pemerintah Jepang.

Maraknya proyek konstruksi dan irigasi pada era Tokugawa, membuat Pejabat Pemerintah harus mengeluarkan biaya besar guna membayar upah para pekerja. Berupaya mengatasi masalah tersebut, *bakuto* yang beroperasi di jalan-jalan besar, direkrut (dipekerjakan) untuk berjudi dengan para pekerja untuk memperoleh kembali upah para pekerja. Secara harfiah, yakuza sendiri merujuk pada kelompok *bakuto*. Hal ini bermula dari kemungkinan skor terburuk dalam permainan kartu *hanafuda* (bunga)⁷ yaitu: *ya ku sa* (8-9-3) yang memiliki arti “masyarakat tidak berguna” yang berkembang menjadi julukan bagi “penjudi” itu sendiri. Baru pada abad ke-20, penjulukan yakuza mulai ditujukan bagi kedua kelompok (Chaterine 2015, 5).

⁶ Sebagian besar dipenuhi oleh golongan miskin, tidak memiliki tanah, penjahat dan orang-orang yang terpinggirkan dalam masyarakat Jepang.

⁷ Sejenis permainan *Blackjack* yang bertujuan mencapai angka tertinggi (9) dan bukan 0 (nol) sedangkan “yakuza” merupakan angka terburuk sebab menghasilkan angka nol.

2.2 Yakuza Modern (Gengster)

Memasuki era modernisasi (abad ke-20), eksistensi yakuza dengan beragam bisnisnya saat ini berawal dari peristiwa ekonomi gelembung⁸ pada 1980-an (Marika 2015, 9; Chaterine 2015, 9; Ando t.thn). Meningkatnya nilai yen hingga dua kali lipat dari dolar AS, telah menempatkan Jepang sebagai salah satu negara *superpower* dunia. Jepang mengalami ekonomi gelembung, memiliki kekuatan beli yang besar di luar negeri. Di saat yang sama, Bank Sentral Jepang mengikuti kebijakan moneter ekspansioner, tanpa kehati-hatian memudahkan kredit pinjaman kepada para investor termasuk yakuza untuk berinvestasi dalam bisnis properti dan saham. Akibatnya, yakuza menjadi penyerap kredit berlebih mencapai triliunan yen (miliaran dolar AS), berinvestasi secara besar-besaran ke area sah seperti pasar saham dan properti, konstruksi, dan pengembangan lahan bisnis lainnya di dalam dan di luar negeri. Pada masa ini, yakuza dijuluki sebagai *keizai yakuza* (gengster ekonomi). Yakuza tidak lagi mengendalikan kebutuhan dalam pasar gelap, melainkan beralih mengendalikan barang-barang mewah seperti klub malam di Ginza hingga lelang seni di New York. Namun jauh sebelum itu, geng besar yakuza sudah memiliki bisnis yang memakmurkan mereka.

Pada abad ke-19, yakuza merupakan militan ultranasionalis (*uyoku dantai*)⁹, bekerja untuk Pemerintah Jepang. Yakuza tidak saja dipekerjakan untuk menekan kelompok anti-pemerintahan, juga berpartisipasi dalam program “pengembangan lahan” di luar Jepang. Yakuza mengokupasi wilayah Manchuria dan Tiongkok, turut membantu Biro Monopoli Opium Negara dalam mengumpulkan dana dan melemahkan perlawanan penduduk Manchuria, Tiongkok melalui ketergantungan terhadap narkoba. Terkadang, mereka juga menukarkan bahan persediaan seperti nikel, kobalt, tembaga dan radium dengan narkoba. Seiring keberhasilannya

⁸Fenomena pasar dengan melambungnya harga aset terutama ekuitas dan properti yang jauh di atas nilai seharusnya. Peristiwa ini diakibatkan *Plaza Accord* oleh negara-negara G7 pada 1985. Dunia sepakat untuk mendevalusi dolar AS guna membangkitkan kembali industri ekspor AS. Oleh sebab itu, apresiasi yen terhadap dolar AS terlalu tajam.

⁹Kelompok sayap kanan nasionalis Jepang, yang bertugas sebagai pengawal pjabat dan pimpinan politik Jepang, pasukan militer bersenjata, spionase dan pembunuh bayaran.

(dalam tujuan politik), yakuza kembali ke negaranya untuk mengembangkan kegiatan mereka seperti mengumpulkan warga miskin di sekitar dermaga untuk bisnis konstruksi dan kargo. Yakuza mulai mempelajari bisnis sah, meski demikian tetap melanjutkan perjudian sebagai bisnis utama mereka. Ini merupakan awal dari difungsikannya bisnis sah yakuza sebagai kedok untuk melakukan kegiatan ilegal (Gragert 1997, 156; Johnson 2017, 5).

Pasca kekalahan Jepang oleh AS dalam PD 2 (1945), Jepang di bawah okupasi AS, mengakibatkan yakuza semakin tumbuh subur dan berkuasa di Jepang. Hal ini dikarenakan absennya pemerintahan (*vacuum of power*) dan pembatasan akses pangan oleh AS, yang secara langsung maupun tidak, telah membantu memunculkan dan menyuburkan pasar gelap di Jepang (Gragert 1997, 158; Marika 2015, 11). Yakuza mengendalikan pasar gelap, struktur dan metodenya berubah menjadi lebih ganas, atau disebut *gurentai* (penjahat). Yakuza membawa senjata api, melanggar kode etik dan menjadikan warga sipil sebagai target sasaran kejahatan mereka. Sampai berakhirnya masa okupasi AS, yakuza bersamaan dengan pulihnya perekonomian Jepang (1950-an), mulai mengembangkan bisnisnya dengan mengendalikan barang-barang mewah seperti bar, klub malam, restoran, olahraga profesional, dan prostitusi melalui perlindungan. Yakuza melakukan pemerasan, mulai berkembang ke negara-negara lain seperti: negara-negara di lingkaran Pasifik, Amerika Selatan, Eropa, Afrika Selatan, Hawaii dan pesisir Amerika untuk bisnis perdagangan narkoba. Dengan demikian, dapat dijelaskan bahwa jauh sebelum kesuksesannya saat ini, yakuza sudah menghasilkan uang yang besar dari bisnis “kotor” mereka. Ditambah dengan pinjaman-pinjaman yang diperoleh dari bank-bank Jepang, bisnis yakuza semakin berkembang di dalam dan di luar negeri.

Pada 1960-an, yakuza menjadi organisasi (kriminal) terbesar di Jepang, mulai menggabungkan kekuatan mereka; mendominasi beberapa dari ribuan geng yang ada serta menandai masing-masing wilayah operasi bisnis mereka hingga memunculkan persaingan yang memicu konflik, seperti yang terjadi antara Yamaguchi-gumi dan Inagawa-kai (1972). Konflik keduanya berlangsung sejak

lama, namun berkat Yoshio Kodama¹⁰ konflik berhasil diakhiri. Sampai wafatnya Kodama (1984), konflik kembali pecah (1990) hingga menimbulkan korban jiwa yang melibatkan warga sipil. Sebelumnya, konflik (perang antar geng) besar lainnya juga pernah terjadi sepanjang tahun 1985-1990 yaitu (thediplomat.com, 2019): konflik pemisahan diri Ichiwa-kai (geng afiliasi) dari Yamaguchi-gumi yang menewaskan 25 anggota yakuza dan melukai puluhan lainnya termasuk warga sipil, serta konflik balas dendam Yamaguchi-gumi atas tewasnya dua anggota eksekutif geng afiliasi mereka oleh Nibiki-kai (geng afiliasi Inagawa-kai) di Hachionji, yang berlanjut dengan pelanggaran kesepakatan wilayah operasi bisnis oleh Inagawa-kai (1990), yang merupakan kelanjutan dari konflik tahun 1972 (japantimes.co.jp, 2019).

Wafatnya Kodama tidak saja membuat yakuza kehilangan *godfather of underworld*, juga terputusnya akses dalam pemerintahan. Yakuza semakin sering berkonfrontasi antara geng kecil maupun geng besar, mengakibatkan kepemilikan senjata api meningkat di Jepang. Oleh sebab itu, Pemerintah yang khawatir akan jatuhnya lebih banyak korban melibatkan warga sipil, berinisiasi membuat kebijakan khusus untuk menangani masalah tersebut. Pada tahun 1991, Jepang mulai memperkenalkan *Anti-boryokudan*. Hukum berlaku sebagai jalan tengah antara *Racketeer Influenced and Corrupt Organizations – RICO Act (1970)*¹¹ dan pasal *416-bis KUHP Italia (1982)*¹² (Higgins, 2014), bertujuan untuk mengendalikan tindakan intimidasi dan kekerasan yang dilakukan oleh preman (yakuza), mengambil langkah-langkah yang mendorong organisasi layanan masyarakat untuk mencegah bahaya yang mengancam hidup warga negara dari pertikaian antar-geng, serta menjamin kehidupan sehari-hari yang aman dan damai, dan melindungi kebebasan dan hak-hak rakyat (NPA, 2007).

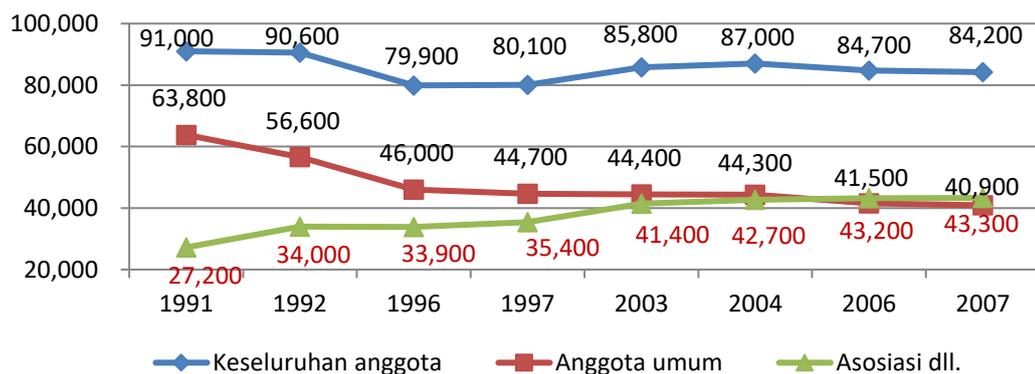
¹⁰ Tokoh paling berpengaruh pasca PD II, Jepang. memimpin organisasi sayap kanan dan beroperasi dibelakang layar untuk mempengaruhi kebijakan Pemerintah. Kodama berperan besar terhadap berdirinya Partai Demokrat Liberal Jepang (*Liberal Democratic Party – LDP*), dan penghubung organisasi yakuza ke pemerintahan.

¹¹ Hukum yang dikeluarkan AS untuk memerangi dan mengkriminalisasi anggota OCG yang terlibat dalam kegiatan ilegal: pemerasan, perjudian, penyuapan, penculikan, pembunuhan, pencucian uang, pemalsuan, penggelapan, perdagangan narkoba, perbudakan dan sejumlah praktik bisnis tidak menyenangkan lainnya, sebagai bagian dari perusahaan kriminal.

¹² Hukum yang menggagas mafia sebagai asosiasi kriminal.

Sejak awal implementasinya, *Anti-boryokudan* telah mengalami beberapa kali amandemen di antaranya pada tahun 1993, 1997 dan 2004 (NPA 2015, 9). Tiap-tiap amandemen tersebut memiliki pencapaian yang berbeda atau disesuaikan dengan urgensitas yang ada (responsif).

Grafik 2.1 Keanggotaan Yakuza Tahun 1991-2007



Sumber: NPA 2008, 25

Pada implementasinya di tahun 1992 (lihat Grafik 2.1), *Anti-boryokudan* nampak mempengaruhi penurunan jumlah keanggotaan yakuza yang terbagi menjadi anggota umum dan asosiasi 0,4 persen, atau 90.600 anggota dari semula 91.000 anggota (1991). Angka mengalami turun-naik, sampai memasuki tahun 2005-07, angka secara konsisten turun (2.4 persen); dari semula 86.300 anggota (2005) menjadi 84.200 anggota dengan 21 geng¹³ tersisa (2007). Namun secara spesifik, penurunan tersebut hanya terjadi pada anggota umum saja, sedangkan pada anggota asosiasinya terus mengalami peningkatan hingga 59 persen: semula 27.200 anggota (1991) menjadi 43.300 anggota (2007). Di Jepang, meski masing-masing geng yakuza memiliki anggotanya sendiri, namun 72.5 persen dari mereka berafiliasi dengan tiga geng besar yakuza, yaitu: Yamaguchi-gumi, Sumiyoshi-kai dan Inagawa-kai.

Yamaguchi-gumi merupakan sindikat dunia bawah terbesar, terkuat dan terkaya di Jepang, dibentuk dan didirikan oleh Yamaguchi Harukichi di Kobe pada 1915. Yamaguchi-gumi beranggotakan 39.000 orang (2007), pengaruhnya

¹³ Sindikat yang dilabeli sebagai *shitei-boryokudan* adalah “kelompok kekerasan yang ditunjuk” untuk diawasi oleh kepolisian.

menyebarkan hingga ke seluruh wilayah di Jepang. Yamaguchi-gumi mengoperasikan sebagian besar bisnisnya di belakang perusahaan depan kepemilikan sendiri disebut *Association of Harbor Stevedoring Promotions*, sangat terlibat dalam industri konstruksi dan kargo. Sindikat juga terlibat dalam pencucian uang, penyelundupan dan perdagangan ilegal, pornografi, pemalsuan, pemerasan, prostitusi, perjudian, rentenir dan pengendalian ribuan warung pinggir jalan dan industri hiburan (perlindungan), juga terlibat dalam olahraga profesional seperti tinju dan gulat sumo. Dari berbagai operasi kegiatan ilegal, sindikat menghasilkan sebagian besar keuntungannya dari penjualan narkoba, terutama amfetamin. Sindikat juga memperoleh keuntungan dari sumber legal lainnya meliputi real-estat, permainan video, lapangan golf, *trucking*, pembuangan limbah, layanan keamanan, rumah pemandian, restoran, bar, rumah sakit, sekolah Bahasa Inggris, tempat hiburan, dan investasi luar negeri. Namun, kemungkinan besar bisnis tersebut dibeli dengan hasil uang kejahatan yang operasinya disembunyikan di perusahaan depan. Pada 1970-an, Yamaguchi-gumi diperkirakan mengendalikan sekitar 7.000 toko, 5.000 restoran, 4.500 operasi pencucian uang, 2.300 rumah pemandian, 2.500 bar, 600 perusahaan properti dan 400 perusahaan transportasi (Gragert 1997, 175).

Selanjutnya, Inagawa-kai dibentuk dan didirikan oleh Kakuji Inagawa di Tokyo pada 1949, beranggotakan 9.500 orang (2007) dengan pengaruhnya yang menyebar ke wilayah timur Jepang (Kanto). Serupa dengan Yamaguchi-gumi, Inagawa-kai turut terlibat dalam kegiatan rentenir, investasi luar negeri, pencucian uang, pengendalian senjata, pemerasan, prostitusi, dan transaksi narkoba melalui perusahaan depan. Namun sedikit berbeda dari Yamaguchi-gumi, sindikat merupakan turunan langsung dari *bakuto*, yang berarti perolehan utama sindikat dihasilkan dari kegiatan yang berkaitan dengan perjudian seperti taruhan ilegal, pengadaan pariwisata judi, mengelola kasino dan permainan kartu lainnya. Sebagai geng yakuza terkuat ketiga di Jepang, Inagawa-kai merupakan sindikat yakuza pertama yang beroperasi hingga internasional. Pada 1979, Inagawa-kai diperkirakan mengelola sekitar 879 bisnis legal seperti konstruksi, perusahaan

hiburan, bar, kabaret, lapangan golf, dan restoran. Sementara itu, relatif sama dengan dua sindikat sebelumnya, Sumiyoshi-kai dibentuk dan didirikan oleh Matsugoro Ito di Tokyo pada 1958, mengoperasikan beragam bisnis melibatkan kejahatan kerah putih. Meski demikian, perolehan utama sindikat dihasilkan dari kegiatan pemerasan (perlindungan) dan perjudian (turunan *bakuto*). Sebagai sindikat terbesar kedua di Jepang, Sumiyoshi-kai beranggotakan 12.600 orang (2007), dengan pengaruh yang menyebar hingga ke seluruh wilayah timur Jepang (Yokohama).

2.3 *Yakuza Money Crimes*

Yakuza secara tradisional menghasilkan uang mereka dari tiga kegiatan ilegal, yaitu: transaksi narkoba, pemerasan, perjudian dan/atau taruhan ilegal. Namun sejak tahun 1960-an, yakuza secara bertahap mengalihkan kegiatan mereka menuju peluang keuangan baru yang disebut *yakuza money crimes* (Kawasaki 2010, 93). *Yakuza money crimes* mencurangi properti masyarakat Jepang di kehidupan sehari-hari, serta menghancurkan korporasi maupun lembaga sah negara melalui *yamikin* (rentenir)¹⁴, *sokaiya* (pemerasan)¹⁵ dan *jiageya* (akuisisi lahan milik orang lain)¹⁶. *Yakuza money crimes* pada karakteristik utamanya adalah partisipasi secara langsung para pemeras (yakuza). Sampai Anti *boryokudan* diperketat, yakuza menciptakan jenis baru *yakuza money crimes* melalui orang-orang yang hidup berdampingan dengan yakuza (*co-conspirator*).

Dipermukaan, para *co-conspirator* menyembunyikan hubungan mereka dengan yakuza. Namun dibalik layar, mereka terutama yang memiliki usaha atau akses terhadap usaha dan bekerja sama dalam kegiatan perolehan dana dengan yakuza, menggunakan pengaruh dan kekuatan finansial yakuza untuk menaikkan

¹⁴ Penagihan utang pinjaman uang dengan bunga tinggi (rentenir). Meski tidak semua *yamikin* terhubung dengan yakuza, namun banyak yakuza mengelola *yamikin* untuk mencuci uang kotor mereka.

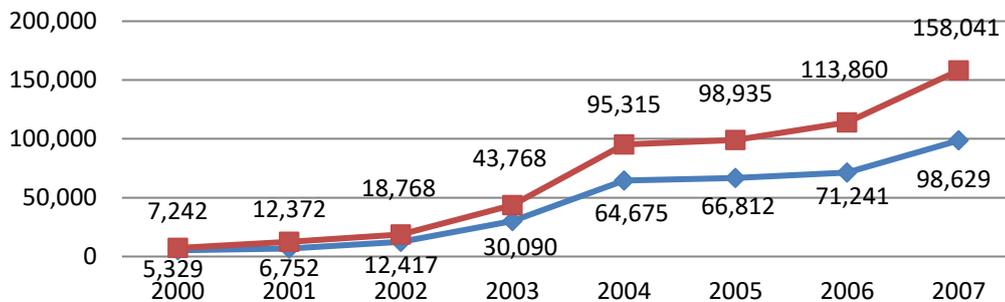
¹⁵ Pemeras perusahaan yang terdiri dari pemegang saham profesional, yang dipekerjakan satu perusahaan untuk menekan lawan perusahaan. *Sokaiya* tidak selalu kejahatan keuangan, namun pemeras sering menjadikan lembaga keuangan sebagai sasaran mereka untuk mendapat akses pinjaman besar tanpa perlu mengembalikannya. Yakuza terlibat dalam kegiatan *sokaiya* sejak 1972

¹⁶ Broker yang menakut-nakuti pemilik atau penyewa lahan untuk meninggalkan lahan mereka menggunakan ancaman dan bahkan merusak properti.

keuntungan mereka (symbiosis). Jenis baru *yakuza money crimes* meliputi pencucian uang, di Jepang, pencucian uang dikriminalkan sebagai berikut (JAFIC 2007, 35): Kontrol terhadap pengelolaan perusahaan melalui hasil pidana, menyembunyikan hasil pidana dan penerimaan hasil pidana sesuai *Act on Punishment of Organized Crimes* (UU Hukuman Kejahatan Terorganisir); Penyembunyian hasil pidana dan penerimaan hasil pidana terkait narkoba sesuai *Anti-Drug Special Provisions Law* (Ketentuan Khusus Anti-Narkoba).

Dalam mengungkap kasus pencucian uang oleh yakuza, Jepang melakukan penyidikan terhadap pelaporan STR oleh pelaku usaha legal seperti perbankan, perusahaan perkreditan, sekuritas, pinjaman, asuransi dan perindustrian (JAFIC, 2007). Setelahnya, penyidik akan menganalisis informasi dalam STR tersebut yang dicocokkan dengan kasus STR terkait lainnya dan berbagai informasi dari Polisi mengenai yakuza, sampai ditemukannya pemindahan sejumlah besar uang yang dibuat yakuza melalui pengiriman uang ke luar negeri dengan memanfaatkan perusahaan afiliasi yakuza, kemitraan investasi dan korporat lainnya.

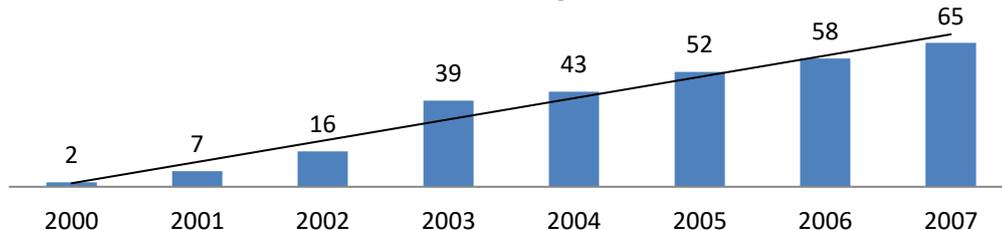
Grafik 2.2 Laporan STR Tahun 2000-2007



Sumber: JAFIC 2008, 26

—◆— Laporan yang diberikan ke investigator
—■— Laporan yang diterima JAFIC

Grafik 2.3 Kasus Pencucian Uang Yakuza Tahun 2000-2007



Sumber: NPA 2007, 43

Pada Grafik 2.2 dijelaskan bahwa pelaporan STR mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2007, pelaporan STR pada puncaknya mencapai 158.041 laporan dengan 98.629 laporan (62.4 persen), diberikan kepada otoritas penyidik¹⁷. Hasilnya, ditemukan kasus pencucian uang oleh – dengan melibatkan yakuza, yang turut meningkat tiap tahunnya (Grafik 3.3). Pada tahun 2007, teridentifikasi sebanyak 65 kasus pencucian uang oleh – dengan melibatkan yakuza, telah diselesaikan (7 kasus lebih banyak dari tahun sebelumnya); 60 kasus pencucian uang di antaranya melanggar UU Hukuman Kejahatan Terorganisir dan, 5 kasus lainnya melanggar Ketentuan Khusus Anti-Narkoba. Dari sebagian besar kasus-kasus tersebut, yakuza turut melibatkan *co-conspirator* yang memiliki usaha atau akses terhadap usaha dan bekerja sama dalam kegiatan perolehan dana dengan yakuza. Sebagai contoh adalah kasus pencucian uang mantan ketua geng Goryo-kai, Susumu Kajiyama (japantimes.co, 2019).

Pada tahun 2003, Kajiyama merupakan ketua geng Goryo-kai (afiliasi Yamaguchi-gumi), didakwa telah melakukan praktik *yamikin* dan mencuci keuntungan senilai 9.4 miliar yen yang disembunyikan di dalam lembaga keuangan luar negeri. Menurut dakwaan, Kajiyama menjalankan 1.000 jaringan *yamikin* yang dibantu komplotannya (anggota geng senior): Toshikazu Matsuzaki dan Hirokatsu Okuno. Keduanya, membantu Kajiyama mencuci keuntungan *yamikin* dengan membeli surat utang (obligasi bank) dari tiga bank senilai 4.3 miliar yen yang disembunyikan dalam bank Credit Suisse¹⁸ cabang Hong Kong melalui Atsushi Doden (*co-conspirator*). Doden merupakan pegawai bank di Credit Suisse cabang Hong Kong, diduga telah membantu mengatur rekening atas nama Kajiyama dan mentransfer keuntungan ke rekening tersebut.

Adanya kasus ini, Jepang bekerja sama dengan otoritas berwenang di Swiss dan Hong Kong. Hasilnya, ditemukan aset senilai 5.1 miliar yen (58.3 juta dolar AS) milik Kajiyama dalam bentuk deposito (1.14 miliar yen) dan sekuritas (3.96 miliar yen) dalam rekening (yang tidak disebutkan namanya) di bank Swiss. Atas

¹⁷ Polisi Prefektur, Kantor Kejaksaan, Departemen Pengendalian Narkotika, Penjaga Pantai Jepang, Komisi Pengawasan Bea Cukai dan Sekuritas dan Bursa

¹⁸ Bank investasi dan manajemen investasi terkemuka yang berasal dari Swiss

kejahatannya tersebut, Kajiyama divonis hukuman 6,5 tahun penjara dengan denda 5.1 miliar yen (2005). Untuk komplotan yang terlibat, masing-masing divonis penjara 4 tahun 6 bulan, dengan denda sebesar 20 juta yen untuk Matsuzaki, dan 5 juta yen untuk Okuno. Lain halnya dengan Doden, meski diketahui membantu Kajiyama, Doden dibebaskan dari hukuman sebab dirinya mengaku tidak mengetahui asal uang tersebut, dan kurangnya bukti yang menunjukkan keterlibatan Atsushi Doden dalam kasus Kajiyama. Namun, banyak penyidik yang menyakini jika Doden merupakan afiliasi dari Kajiyama.

Setelahnya, menyusul tahun 2008, Swiss menyetujui untuk membagi rata aset milik Kajiyama (58.3 juta dolar AS) yang dibekukan oleh bank Swiss untuk membantu mengganti kerugian korban jaringan *yamikin* (japantimes.co, 2019).